

BAB III

PELAKSANAAN FUNGSI, WEWENANG, DAN TUGAS

3.3.2.7 KOMISI VII

Pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2024 – 2025

Pergantian Periode Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari periode 2019-2024 ke periode 2024-2029 membawa dinamika sebagai dampak polarisasi politik pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Rapat Paripurna DPR RI tanggal 15 Oktober 2024 telah secara resmi menetapkan jumlah dan komposisi Alat Kelengkapan DPR RI (AKD) periode 2024-2029. AKD yang ditetapkan terdiri atas Komisi, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, BAKN, BKSAP, MKD, BURT, Panitia Khusus dan Badan Aspirasi Masyarakat. DPR RI periode 2024-2029 telah menetapkan jumlah Komisi yang semula hanya 11 komisi menjadi 13 Komisi. Penambahan tersebut untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahan periode 2024-2029.

Dalam melaksanakan tiga fungsi DPR RI yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, Komisi VII yang merupakan AKD baru membidangi Perindustrian, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, UMKM dan Sarana Publikasi dengan Mitra Kerja sebagai berikut:

- a. Kementerian Perindustrian;
- b. Kementerian Pariwisata;
- c. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif;
- d. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- e. Badan Standardisasi Nasional (BSN);
- f. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI);
- g. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI);
dan
- h. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara.

Komisi VII DPR RI menyusun dan menetapkan jadwal masa sidang melalui Rapat Pimpinan dan Rapat Internal:

1.1. Rapat Pimpinan

1.1.1. Rapat Pimpinan Komisi VII DPR RI, pada Kamis, 24 Oktober 2024, dimulai pukul 10.00 WIB. **Rapat dipimpin oleh Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A/Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional.**

Dengan agenda sebagai berikut:

1. Menyusun Program Kerja Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025;
2. Lain – lain.

Kesimpulan rapat:

Rapat bersifat tertutup untuk umum

1.2. Rapat Intern

1.2.1. Rapat Intern Komisi VII DPR RI, pada Kamis, 24 Oktober 2024, dimulai pukul 11.00 WIB. **Rapat dipimpin oleh Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A/Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional.**

Dengan agenda sebagai berikut:

1. Menetapkan Program Kerja Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 – 2025;
2. Menetapkan Daerah Kunjungan Kerja Spesifik Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 – 2025;
3. Menetapkan Daerah Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024 – 2025;
4. Lain-lain.

Kesimpulan rapat:

Rapat bersifat tertutup untuk umum

3.3.2.7.1. Kinerja Fungsi Legislasi

Pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2024 – 2025,

Pada Masa Persidangan I ini, Komisi VII DPR RI belum melaksanakan fungsi kegiatan legislatif

3.3.2.7.2. Kinerja Fungsi Anggaran

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 tidak ada pembahasan dikarenakan siklus anggaran telah selesai dilakukan pembahasan pada bulan September 2024.

3.3.2.7.3. Kinerja Fungsi Pengawasan

1. Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, Komisi VII telah melakukan rapat-rapat sebagai berikut:

1.1. Rapat Dengar Pendapat

1.1.1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Kepala BKD, pada Selasa, 29 Oktober 2024, dimulai pukul 13.30 WIB. Rapat dipimpin oleh Hj. Chusnunia Chalim., Ph.D./Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Dengan agenda sebagai berikut:

- a. Masukkan Badan Keahlian DPR RI terhadap RUU Usul Prolegnas Jangka Menengah tahun 2024-2025 dan RUU Prolegnas jangka pendek dan jangka Panjang Komisi VII;
- b. Lain-lain.

Kesimpulan rapat:

Rapat bersifat tertutup untuk umum

1.2. Konsinyasi Pembahasan Penetapan Program Kerja TA 2025 Mitra Kerja Komisi VII DPR RI pada hari Rabu s.d. Jumat, 30 Oktober s.d 1 November 2024.

1.2.1. Konsinyasi, Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Perindustrian RI dan Pejabat Eselon I Badan Standardisasi Nasional, pada hari Rabu 30 Oktober 2024, pukul 10.30 WIB s.d. 15.30 WIB. **Rapat dipimpin oleh Hj. Chusnunia Chalim, Ph.D. /Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB.**

Dengan agenda sebagai berikut:

1. Pembahasan Penetapan Program Kerja TA 2025 Mitra Kerja Komisi VII DPR RI;
2. Lain-lain.

Mitra Kerja:

Eselon I Kementerian Perindustrian:

1. Sekretaris Jenderal / Plt. Dirjen Industri Ketahanan Perwilayahan & Akses Industri Internasional (KPAII), Eko S.A Cahyanto;
2. Inspektur Jenderal, Mohammad Rum;
3. Dirjen Industri Agro, Putu Juli Ardika; Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) / PDirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT), Reni Yunita;
4. Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi & Elektronika (ILMATE), Setia Diarta;
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI), Masrokhan;
6. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Andi Rizaldi.

Eselon I Badan Standardisasi Nasional:

1. Kepala BSN, Drs. Kukuh S. Achmad, M.SC;
2. Sekretaris Utama, Donny Purnomo JE, ST;
3. Deputi Bidang Pengembangan Standar, Hendro Kusumo, SP;
4. Deputi Bidang Penerapan Standar Dan Penilaian Kesesuaian, Dr. Dra. Zakiyah, M.M;
5. Deputi Bidang Akreditasi, Dr. Wahyu Purbowasito S.W., M.Sc;
6. Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran, Yustinus Kristianto Widiwardono, MIT.

Kesimpulan rapat:

Rapat bersifat tertutup untuk umum

1.2.2. Konsinyasi, Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan LPP RRI, LPP TVRI, dan Kantor Berita Antara, pada hari Jumat 1 November 2024, pukul 15.30 WIB s.d. 18.05 WIB. Rapat dipimpin oleh Dr. Evita Nursanty, M.Sc. /Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Dengan agenda sebagai berikut:

1. Pembahasan Penetapan Program Kerja TA 2025 Mitra Kerja Komisi VII DPR RI;
2. Lain-lain.

Mitra Kerja:

1. Direktur Utama LPP RRI, I Hendrasmo;
2. Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno ;
3. Direktur Utama Kantor Berita Antara, Akhmad Munir

Kesimpulan rapat:

Rapat bersifat tertutup untuk umum

1.2.3. Konsinyasi Pembahasan Penetapan Program Kerja TA 2025 Mitra Kerja Komisi VII DPR RI pada hari Senin s.d. Rabu, 4 November s.d 6 November 2024.

Konsinyasi, Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pada hari Senin 4 November 2024, pukul 10.00 WIB s.d. 13.49 WIB. Rapat dipimpin oleh Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra.

Dengan agenda sebagai berikut:

1. Pembahasan Penetapan Program Kerja TA 2025 Mitra Kerja Komisi VII DPR RI;
2. Lain-lain.

Mitra Kerja:

Eselon I Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif:

1. Plt. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dessy Ruhati;
2. Inspektur Utama, Bayu Aji;
3. Deputi Bidang Kebijakan Strategis, Dessy Ruhati;
4. Deputi Bidang Sumber Daya dan

- Kelembagaan, Martini M. Paham;
5. Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur , Hariyanto;
 6. Deputi Bidang Industri dan Investasi, Rizki Handayani;
 7. Deputi Bidang Pemasaran, Ni Made Ayu Marthini;
 8. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (Events), Vinsensius Jemadu ;
 9. Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, M. Neil El Himam;

Kesimpulan rapat:

Rapat bersifat tertutup untuk umum

- 1.2.4. Konsinyasi, Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia, pada hari Rabu 6 November 2024, pukul 14.55 WIB s.d. 17.38 WIB. Rapat dipimpin oleh Dr. Evita Nursanty, M.Sc./Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.**

Dengan agenda sebagai berikut:

1. Pembahasan Penetapan Program Kerja TA 2025 Mitra Kerja Komisi VII DPR RI;
2. Lain-lain.

Mitra Kerja:

Eselon I Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia :

1. Sekretaris Kementerian, Ir. Arif Rahman Hakim, MS
2. Deputi Bidang Usaha Mikro, Dr. Yulius, MA;
3. Plt. Deputi Bidang Usaha Kecil Menengah, Temmy Setya Permana, S.Si;
4. Deputi Bidang Kewirausahaan, Ir. Siti Azizah, MBA;
5. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, Drs. Supomo, Ak, MM;
6. Direktur Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUKM, Wientor Rah Mada.

Kesimpulan rapat:

Rapat bersifat tertutup untuk umum

1.3. Rapat Kerja

- 1.3.1. Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Perindustrian,** pada hari Selasa 12 November 2024, pukul 13.00 WIB. **Rapat dipimpin oleh Dr. Evita Nursanty, M.Sc./Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.**

Dengan agenda sebagai berikut:

1. Pemaparan dan Pembahasan Program Kerja Kementerian Perindustrian;
2. Lain-lain.

Kesimpulan Rapat:

1. Alokasi pagu anggaran Kementerian Perindustrian RI TA 2025 sebesar Rp 2.519.612.734.000,- (*Dua Triliun Lima Ratus Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*).
2. Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Perindustrian untuk melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas dalam rangka mengupayakan penambahan anggaran sebesar Rp 1.500.000.000.0000,- (*Satu Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah*) sebagaimana diusulkan oleh Kementerian Perindustrian kepada DPR RI. Komisi VII DPR RI juga mendorong agar Kementerian Perindustrian menyampaikan kebutuhan anggaran ini kepada Presiden RI dalam rangka merealisasikan Asta Cita dan tercapainya tujuan pertumbuhan ekonomi 8 persen sebagaimana yang ditargetkan Pemerintah.
3. Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Perindustrian RI melakukan koordinasi lintas sektoral dan mengambil langkah strategis guna mengatasi berbagai masalah dan tantangan industri nasional, antara lain: penanganan kepailitan Sritex, serapan susu segar peternak rakyat, dukungan keberpihakan pemerintah terhadap industri tekstil dan industri maritim, resiko arus importasi akibat kebijakan perdagangan global khususnya Amerika Serikat dan Tiongkok, upaya *link and match* antara penguatan/pelatihan Sumber Daya Manusia dengan kebutuhan industri serta evaluasi penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri guna mengoptimalkan industri dalam negeri.

4. Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Perindustrian RI untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menyusun/melaksanakan rencana kerja dan program prioritas tahun 2025 dengan optimal guna perwujudan Asta Cita kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam;
 - b. mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun 2025 sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kinerja kementerian dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
 - c. mengoptimalkan penyerapan anggaran pada waktu yang tersisa tahun 2024 guna merealisasikan target output dan indikator kinerja Kementerian Perindustrian yang telah ditetapkan;
 - d. membuat peta jalan komoditas prioritas yang akan didorong hilirisasinya berdasarkan potensi kontribusi terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja; dan
 - e. menindaklanjuti seluruh masukan dan saran yang disampaikan dalam Rapat Kerja pada hari ini dalam melaksanakan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025.
5. Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Perindustrian RI memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang belum dijawab paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak rapat hari ini.

1.3.2. Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, pada hari Senin 18 November 2024, pukul 13.00 WIB. **Rapat dipimpin oleh Dr. Evita Nursanty, M.Sc./Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.**

Dengan agenda sebagai berikut:

1. Pemaparan dan Pembahasan Program Kerja Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif;
2. Lain-lain.

Kesimpulan Rapat:

1. Komisi VII DPR RI menerima penjelasan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI mengenai alokasi pagu anggaran Kementerian Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif RI TA 2025 sebesar Rp 279.606.498.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
2. Komisi VII DPR RI mendukung tambahan anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif dan mendesak Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif untuk melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka mengupayakan penambahan anggaran sebesar Rp 2.422.556.275.000,- (Dua Triliun Empat Ratus Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sebagaimana diusulkan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif RI kepada DPR RI. Komisi VII DPR RI juga mendorong agar Kementerian

Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif menyampaikan kebutuhan anggaran ini kepada Presiden RI dalam rangka merealisasikan Asta Cita dan tercapainya tujuan pertumbuhan ekonomi 8 persen sebagaimana yang ditargetkan Pemerintah.

3. Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif RI untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melaksanakan rencana kerja dan program prioritas tahun 2025 dengan optimal guna mewujudkan Asta Cita kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam;
 - b. mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun 2025 sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kinerja kementerian/badan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
 - c. mempercepat penyelesaian proses perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola terkait perubahan nomenklatur Unit Organisasi Eselon I dan Eselon II;
 - d. menindaklanjuti seluruh masukan dan saran yang disampaikan dalam Rapat Kerja pada hari ini dalam melaksanakan Rencana Kerja Anggaran -rahan 2025.
4. Komisi VII DPR RI mendukung tersusunnya regulasi yang dapat mengakselerasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berupa:
 - a. usulan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta perihal perlindungan yang lebih maksimal bagi para pemegang hak cipta dalam rangka pertumbuhan ekonomi kreatif;

- b. usulan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah perihal perubahan Ekonomi Kreatif dari sub urusan menjadi urusan.
5. Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif RI untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang belum terjawab dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak rapat kerja hari ini.

1.3.3. Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri UMKM, pada hari Selasa 19 November 2024, pukul 13.00 WIB. Rapat dipimpin oleh Dr. Evita Nursanty, M.Sc./Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Dengan agenda sebagai berikut:

1. Pembahasan Program Kerja Kementerian UMKM TA 2025;
2. Lain-lain.

Kesimpulan Rapat:

1. Komisi VII DPR RI menerima penjelasan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah RI mengenai alokasi pagu anggaran Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah RI TA 2025 setelah dipisah dengan Kementerian Koperasi adalah sebesar Rp463.856.211.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah).

2. Komisi VII DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan mendesak Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka mengupayakan penambahan anggaran sebesar Rp1.235.052.581.000 (Satu Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) sebagaimana diusulkan oleh Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah kepada DPR RI guna melaksanakan program/kegiatan:
 - a. SAPA UMKM;
 - b. Kartu Usaha;
 - c. Transformasi Usaha Mikro dari Informal ke Formal, melalui pendampingan dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - d. Re-design PLUT-UMKM dan Layanan Rumah Kemasan;
 - e. UMKM terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis;
 - f. Fasilitasi Kemitraan dan Rantai Pasok serta Perluasan Pemasaran;
 - g. Perluasan Akses Pembiayaan dan Investasi;
 - h. Pendataan lengkap UMKM;
 - i. Inkubasi Usaha;
 - j. Konsultasi dan Pendampingan Usaha; dan
 - k. Penyediaan sarana dan prasarana Kementerian UMKM.

3. Komisi VII DPR RI mendorong agar Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyampaikan usulan kebutuhan tambahan anggaran kepada Presiden RI dalam rangka merealisasikan Asta Cita dan tercapainya tujuan pertumbuhan ekonomi 8 persen sebagaimana yang ditargetkan Pemerintah.
4. Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah RI melakukan koordinasi lintas sektoral dan mengambil langkah strategis guna mengatasi berbagai masalah dan tantangan UMKM, antara lain:
 - a. mengintegrasikan data dan program pemberdayaan UMKM yang tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga;
 - b. melaksanakan pendampingan yang menyeluruh dari hulu hingga ke hilir, yang sekurang-kurangnya mencakup pendampingan perizinan usaha (aspek legalitas, sertifikasi, standardisasi), akses permodalan, akses pemasaran dan kemitraan baik bagi para pengusaha UMKM dan Wirausaha; dan
 - c. mengakselerasi penyusunan implementasi penghapusan piutang macet bagi pengusaha UMKM dan pembentukan *holding* UMKM.
5. Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah RI untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melaksanakan rencana kerja dan program prioritas tahun 2025 dengan optimal guna perwujudan Asta Cita ketiga, keempat, keenam dan ketujuh;

- b. mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun 2025 sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kinerja kementerian dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
 - c. mempercepat penyelesaian proses perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola terkait perubahan nomenklatur Unit Organisasi Eselon I dan Eselon II;
 - d. menindaklanjuti seluruh masukan dan saran yang disampaikan dalam Rapat Kerja pada hari ini dalam melaksanakan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025.
6. Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah RI untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak rapat kerja hari ini.

1.3.4. Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Pariwisata, pada hari Rabu 20 November 2024, pukul 10.00 WIB. Rapat dipimpin oleh Hj. Chusnunia Chalim., Ph.D. /Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Dengan agenda sebagai berikut:

1. Pemaparan dan Pembahasan Program Kerja Kementerian Pariwisata;
2. Lain-lain.

Kesimpulan Rapat:

1. Komisi VII DPR RI menerima penjelasan Menteri Pariwisata RI mengenai alokasi pagu anggaran Kementerian Pariwisata RI TA 2025 sebesar

Rp1.488.741.453.000,- (Satu Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).

2. Komisi VII DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Pariwisata dan mendesak Kementerian Pariwisata untuk melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka mengupayakan penambahan anggaran sebesar Rp2.254.706.954.000,- (Dua Triliun Dua Ratus Lima Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).
3. Komisi VII DPR RI mendorong agar Kementerian Pariwisata menyampaikan usulan kebutuhan tambahan anggaran kepada Presiden RI dalam rangka merealisasikan Asta Cita dan tercapainya tujuan pertumbuhan ekonomi 8 persen sebagaimana yang ditargetkan Pemerintah.
4. Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Pariwisata RI untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melaksanakan rencana kerja dan program prioritas tahun 2025 dengan optimal guna perwujudan Asta Cita ketiga;
 - b. mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun 2025 sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kinerja Kementerian dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
 - c. mempercepat penyelesaian proses perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola

- terkait perubahan nomenklatur Unit Organisasi Eselon I dan Eselon II;
- d. melakukan koordinasi lintas sektoral dan mengambil langkah strategis guna mengatasi berbagai masalah dan tantangan pariwisata; dan
 - e. menindaklanjuti seluruh masukan dan saran yang disampaikan dalam Rapat Kerja pada hari ini dalam melaksanakan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025.
5. Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Pariwisata RI untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak rapat kerja hari ini.

1.4. Rapat Dengar Pendapat

1.4.1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dengan Dirut LPP RRI, Dirut LPP TVRI, Dirut Perum Lembaga Kantor Berita Antara, dan Dewan Pengawas RRI dan TVRI, pada hari Senin 2 Desember 2024, pukul 13.00 WIB. Rapat dipimpin oleh Hj. Chusnunia Chalim., Ph.D. /Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Dengan agenda sebagai berikut:

1. Pembahasan Program Kerja LPP RRI, Dirut LPP TVRI, dan Dirut Perum Lembaga Kantor Berita Antara;
2. Lain-lain.

Kesimpulan Rapat:

1. Komisi VII DPR RI menerima penjelasan Direktur Utama LPP TVRI mengenai alokasi pagu anggaran LPP TVRI Tahun Anggaran 2025 sebesar

Rp1.524.203.659.000,- (Satu Triliun Lima Ratus Dua Puluh Empat Miliar Dua Ratus Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

2. Komisi VII DPR RI menerima penjelasan Direktur Utama LPP RRI mengenai alokasi pagu anggaran LPP RRI Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.070.311.831.000,- (Satu Triliun Tujuh Puluh Miliar Tiga Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).
3. Komisi VII DPR RI menerima penjelasan Direktur Utama Perum LKBN Antara mengenai alokasi pagu anggaran LKBN Antara Tahun Anggaran 2025 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dimana target pendapatan LKBN Antara Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp547.990.000.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).
4. Komisi VII DPR RI mendorong LPP TVRI, LPP RRI dan Perum LKBN Antara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kreativitas produk pemberitaan dan program lainnya yang diminati masyarakat sehingga mampu bersaing dengan lembaga pemberitaan lainnya;
 - b. mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun 2025 sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kinerja Lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
 - c. menyusun tantangan dan hambatan terkait pengembangan program dan peningkatan

kualitas baik secara regulasi, birokrasi maupun anggaran yang hasilnya diserahkan kepada Komisi VII DPR RI: dan

- d. menindaklanjuti seluruh masukan dan saran yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat pada hari ini dalam melaksanakan Rencana Program Kerja Anggaran Tahun 2025.
5. Komisi VII DPR RI meminta LPP TVRI, LPP RRI dan Perum LKBN Antara untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Rapat Dengar Pendapat hari ini.

1.4.2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dengan Kepala BSN, pada hari Selasa 3 Desember 2024, pukul 13.00 WIB. **Rapat dipimpin oleh Rapat dipimpin oleh Dr. Evita Nursanty, M.Sc. /Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.**

Dengan agenda sebagai berikut:

1. Pembahasan Program Kerja BSN;
2. Lain-lain

Kesimpulan Rapat:

Komisi VII DPR RI meminta Badan Standardisasi Nasional melakukan perbaikan bahan paparan Program Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025 untuk disampaikan kembali kepada Komisi VII DPR RI paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak Rapat Dengar Pendapat hari ini dan akan ditindaklanjuti dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI pada tanggal 4 Desember 2024 Pukul 14.00 WIB.

1.5. Rapat Kerja

1.5.1. Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, pada hari Rabu 4 Desember 2024, pukul 10.00 WIB. Rapat dipimpin oleh Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra.

Dengan agenda sebagai berikut:

Tindak lanjut Raker Komisi VII dan Menteri Menteri Ekraf/Badan Ekonomi Kreatif tanggal 18 November tentang pembahasan program kerja dan anggaran tahun 2025.

Kesimpulan Rapat:

1. Komisi VII DPR RI menyetujui pagu anggaran TA 2025 Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif sebesar Rp279.606.498.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 2.422.556.275.000 (Dua Triliun Empat Ratus Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), sehingga total pagu anggaran TA 2025 menjadi sebesar Rp2.702.162.773.000,- (Dua Triliun Tujuh Ratus Dua Miliar Seratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).
2. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif segera berkomunikasi dengan Presiden RI, Kementerian PPN/BAPPENAS dan Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti poin pertama.

3. Komisi VII DPR RI menyetujui usulan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang:
 - a. Rencana kerja dan program prioritas untuk mendukung pencapaian Asta Cita dan mengacu pada Arah Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN yang disusun oleh Kementerian PPN/BAPPENAS, dan
 - b. Penyempurnaan SOTK dan pengisian sumber daya manusia yang kompeten.

4. Komisi VII DPR RI menerima penjelasan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif terkait Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui:
 - a. Usulan revisi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perihal Perubahan Ekonomi Kreatif dari Sub-Urusan menjadi Urusan Pemerintah; dan
 - b. Usulan revisi UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait Pelindungan yang lebih maksimal bagi para pemegang hak cipta produk dan jasa kreatif.

5. Komisi VII DPR RI mendukung upaya Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif menjadikan ekonomi kreatif sebagai sektor penggerak ekonomi masa depan yang Inklusif, Kompetitif, dan Berkelanjutan berdasarkan Asta Cita.

6. Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif untuk:
 - a. Membangun ekosistem industri kreatif yang terintegrasi;

- b. Melakukan koordinasi lintas sektoral dan sub sektor guna mendukung *quick win* dan program unggulan;
 - c. Mengambil langkah strategis guna mengatasi berbagai masalah dan tantangan ekonomi kreatif; dan
 - d. Menindaklanjuti seluruh masukan dan saran yang disampaikan dalam Rapat Kerja pada hari ini dalam melaksanakan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025.
7. Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan/pernyataan Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak rapat kerja hari ini.

1.6. Rapat Dengar Pendapat

1.6.1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dengan Kepala BSN, pada hari Rabu 4 Desember 2024, pukul 14.00 WIB. Rapat dipimpin oleh Rapat dipimpin oleh Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc. /Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Dengan agenda sebagai berikut:

1. Tindak Lanjut Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional pada tanggal 3 Desember 2024 tentang Pembahasan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025;
2. Lain-lain.

Kesimpulan Rapat:

1. Komisi VII DPR RI menyetujui pagu anggaran TA 2025 Badan Standardisasi Nasional sebesar Rp223.867.121.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
2. Komisi VII DPR RI mendesak Badan Standardisasi Nasional untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan rencana kerja dan program prioritas tahun 2025 dengan optimal guna perwujudan Asta Cita, khususnya Asta Cita kedua, ketiga, kelima dan keenam;
 - b. Mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun 2025 sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan kinerja Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Menyusun Peta Jalan Pengembangan Standar Nasional Indonesia termasuk tantangan dan hambatan Badan Standardisasi Nasional dalam menjalankan program kerja baik dari sisi regulasi maupun anggaran. Peta Jalan tersebut selanjutnya diserahkan kepada Komisi VII DPR RI paling lama bulan Maret 2025; dan
 - d. Menindaklanjuti seluruh masukan dan saran yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat pada hari ini dalam melaksanakan Rencana Program Kerja Anggaran Tahun 2025.
3. Komisi VII DPR RI meminta Badan Standardisasi Nasional untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan/ Pernyataan Pimpinan dan Anggota Komisi

VII DPR RI dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Rapat Dengar Pendapat hari ini.

1.7. Kunjungan Spesifik.

Komisi VII DPR RI pada Masa Sidang I Tahun 2024 – 2025 mengagendakan Jadwal Kunjungan Kerja Spesifik, Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, sebagai berikut:

No.	Kunjungan Kerja	Daerah Kunjungan	Tanggal	Keterangan
1.	Kunker Spesifik I	a. Peninjau Lapangan ke PT Sri Rejeki Isman Tbk, Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah	7-9 November 2024	Dipimpin oleh: Ir. Lamhot Sinaga./Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar.
		b. Peninjauan Lapangan ke Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya, Provinsi Jawa Timur	8-10 November 2024	Dipimpin oleh: Dr. Evita Nursanty, M.Sc./Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan.
		c. Peninjauan Lapangan ke Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	9 -11 November 2024	Dipimpin oleh: Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A ./Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PAN.

		Kerajinan dan Batik Yogyakarta Provinsi D.I Yogyakarta		
2.	Kunker Spesifik II	a. Peninjauan Lapangan ke Kawasan Industri Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	13-15 November 2024	Dipimpin oleh: Dr. Evita Nursanty, M.Sc./Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan.
		b. Peninjauan Lapangan ke Sentra IKM Sasirangan Kalimantan Selatan	13-15 November 2024	Dipimpin oleh: Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo./Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra.
		c. Peninjauan lapangan ke Kawasan Industri Medan, Provinsi Sumatera Utara	14-16 November 2024	Dipimpin oleh : Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A./Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PAN.
1.	Kunker Spesifik III	a. Peninjauan lapangan ke Desa Wisata Botubarani, Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo	21-23 November 2024	Dipimpin oleh : Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo./Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra.

		b. Peninjauan Lapangan ke Industri Kecil Menengah keripik pisang Bandar Lampung	21-23 November 2024	Dipimpin oleh : Hj. Chusnunia Chalim., Ph.D. .Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PKB.
		c. Kunjungan Lapangan ke PT Mondelēz Indonesia, di Cikarang, Jawa Barat	21-23 November 2024	Dipimpin oleh : Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A./Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PAN.

Informasi dan masukan yang diperoleh oleh Komisi VII DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik dalam Masa Sidang I Tahun 2024-2025 adalah sebagai berikut:

1.7.1. Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Sri Rejeki Isman Tbk, Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 7-9 November 2024. Dipimpin oleh Ir. Lamhot Sinaga/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya.

Dalam kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI ke PT Sri Rejeki Isman Tbk, Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa catatan dan rekomendasi:

- a. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI sepakat untuk melakukan rapat internal untuk mengevaluasi hasil kunjungan spesifik untuk menentukan langkah selanjutnya.
- b. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI menginginkan PT Sritex melakukan perbaikan-perbaikan baik rasio keuangan dan aksi korporasi ke depannya setelah putusan kasasi

nanti. Penyelamatan bukan hanya putusan kasasinya, tetapi juga penyehatan dari korporasi.

Foto Tim Kunker Spesifik Komisi VII DPR RI di Provinsi Jawa Tengah



1.7.2. Kunjungan Kerja Spesifik ke Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 8-10 November 2024. Dipimpin oleh Dr. Evita Nursanty, M.Sc/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan.

Dalam kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI ke Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya, terdapat beberapa catatan dan rekomendasi:

- a. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI meminta Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya untuk melakukan peningkatan kualitas standardisasi dan sertifikasi produk di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi untuk membantu pengusaha lokal memasuki pasar ekspor.
- b. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI Meminta Balai untuk mempercepat layanan dan lebih proaktif dalam standarisasi industri di Jawa Timur.
- c. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI meminta Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya melakukan

pendampingan untuk daerah dalam program karbon trading dan peningkatan standar sertifikasi halal serta SNI di Jawa Timur.

- d. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI memberikan masukan terkait pengolahan limbah yang tepat dapat menciptakan nilai tambah dan peluang ekspor.

Foto Tim Kunker Spesifik Komisi VII DPR RI di Provinsi Jawa Timur



1.7.3. Kunjungan Kerja Spesifik ke Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta, pada tanggal 8-10 November 2024. Dipimpin oleh Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A./Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN.

Kunjungan Komisi VII DPR RI ke Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik Yogyakarta menghasilkan beberapa catatan dan rekomendasi.

- a. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI meminta Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik Yogyakarta untuk meningkatkan standardisasi kualitas batik di tingkat nasional dan internasional.

- b. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI meminta Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik Yogyakarta untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia melalui pelatihan.
- c. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI meminta Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik Yogyakarta untuk mengembangkan teknologi ramah lingkungan.
- d. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI meminta Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik Yogyakarta untuk mengalokasikan dana untuk riset dan inovasi agar produksi efisien.
- e. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI meminta Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik Yogyakarta untuk meningkatkan daya saing produk batik di pasar internasional.
- f. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI meminta Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik Yogyakarta untuk meningkatkan sertifikasi untuk pengerajin batik.

Foto Tim Kunker Spesifik Komisi VII DPR RI di Provinsi D.I. Yogyakarta



1.7.4. Kunjungan Kerja Spesifik ke Kawasan Industri Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 13-15 November 2024. Dipimpin oleh Dr. Evita Nursanty, M.Sc /Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan.

Dari pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI ke Kawasan Industri Makassar Provinsi Sulawesi Selatan terdapat beberapa catatan dan rekomendasi, sebagai berikut:

- a. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI kunjungan kerja Komisi VII DPR RI meminta PT KIMA untuk melakukan inovasi tata kelola untuk meningkatkan nilai perusahaan dan kontribusi terhadap keuangan negara dan daerah.
- b. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI meminta PT KIMA mengembangkan kawasan industri di Kabupaten Maros dan Kota Pare-Pare dengan konsep industri bernilai tambah tinggi dan Smart-Eco Industrial Park.
- c. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI meminta PT KIMA untuk melakukan inovasi dalam pengolahan limbah B3 agar dapat digunakan kembali sesuai dengan prinsip Smart-Eco Industrial Park.
- d. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI meminta PT KIMA mengatasi polusi udara dan potensi pencemaran sungai dari limbah B3.
- e. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI mendorong PT KIMA untuk mengoptimalkan TJSI dengan melibatkan PKK di tingkat RT/RW.
- f. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI meminta KPAIL Kementerian Perindustrian untuk memeriksa perkembangan Kawasan Industri Takalar.
- g. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI meminta KPAIL untuk konsisten mengembangkan Smart-Eco Industrial Park di seluruh Indonesia, termasuk di Kawasan Industri Makassar.

Foto Tim Kunker Spesifik Komisi VII DPR RI di Provinsi Sulawesi Selatan



DOKUMENTASI



1.7.5. Kunjungan Kerja Spesifik ke Sentra IKM Sasirangan Kalimantan Selatan, pada tanggal 13-15 November 2024. Dipimpin oleh Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra.

Dari pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI ke Sentra IKM Kain Sasirangan Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat beberapa catatan dan rekomendasi, sebagai berikut:

- a. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Perindustrian dan Kementerian UMKM untuk memperkuat akses permodalan, pelatihan SDM, penggunaan teknologi, dan promosi produk IKM sasirangan agar berdaya saing dan menjangkau pasar lebih luas.
- b. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI berharap agar IKM memperoleh sertifikasi untuk meningkatkan kredibilitas dan pendapatan daerah.
- c. Bantuan untuk mencantumkan produk IKM di e-katalog agar bisa menjangkau pasar luar daerah.

Foto Tim Kunker Spesifik Komisi VII DPR RI di Provinsi Kalimantan Selatan



1.7.6. Kunjungan Kerja Spesifik ke Kawasan Industri Medan, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 14-16 November 2024. Dipimpin oleh Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A /Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN.

Dari pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI ke Kawasan Industri Medan, Provinsi Sumatera Utara, terdapat beberapa catatan dan rekomendasi, sebagai berikut:

- a. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI mengharapkan PT Kawasan Industri Medan dan Kementerian Perindustrian melihat peluang pemanfaatan integrasi konektivitas antar-infrastruktur ke wilayah pelabuhan dan rel kereta api. Integrasi infrastruktur transportasi penting agar arus barang lancar dan harga-harga di pasaran dapat terjangkau.
- b. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI meminta PT Kawasan Industri Medan untuk dapat meningkatkan strategi untuk lebih menarik minat investasi asing.
- c. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI meminta penerapan teknologi di PT Kawasan Industri Medan dapat ditingkatkan dan dimonitor secara *real time*.
- d. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI meminta PT Kawasan Industri Medan untuk mencari solusi untuk meningkatkan ketersediaan gas di Kawasan Industri Medan.
- e. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI mengapresiasi penanganan limbah di Kawasan Industri Medan yang sudah baik dan mengingatkan PT Kawasan Industri Medan untuk meningkatkan penanganan limbah lebih maksimal.
- f. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI menekankan pentingnya sistem manajemen risiko untuk mengatasi permasalahan banjir di Kawasan Industri Medan.

Foto Tim Kunker Spesifik Komisi VII DPR RI di Provinsi Sumatera Utara



1.7.7. Kunjungan Kerja Spesifik ke Desa Wisata Botubarani, Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, pada tanggal 21-23 November 2024. Dipimpin oleh Rahayu Saraswati D. Djojhadikusumo/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra.

Dari pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI ke Desa Wisata Botubarani, Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo terdapat beberapa catatan dan rekomendasi, sebagai berikut:

- a. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI menekankan pentingnya menjaga ekosistem laut agar hiu paus tetap menarik wisatawan.
- b. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI mendorong program edukasi tentang kebersihan dan kelestarian satwa laut.
- c. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI mengharapkan Desa Wisata Botubarani menjadi model pariwisata berkelanjutan.
- d. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI mengingatkan perlunya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku wisata untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Foto Tim Kunker Spesifik Komisi VII DPR RI di Provinsi Gorontalo





1.7.8. Kunjungan Kerja Spesifik ke IKM keripik pisang di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada tanggal 21-23 November 2024. Dipimpin oleh Hj. Chusnunia Chalim., Ph.D./Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Dari pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI ke IKM keripik pisang di Bandar Lampung, Provinsi Lampung terdapat beberapa catatan dan rekomendasi, sebagai berikut:

- a. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI menekankan perlunya menjaga ketersediaan bahan baku IKM, terutama di musim kemarau.
- b. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI meminta agar dilakukan pembinaan untuk petani mengenai standar kualitas bahan baku agar dapat bersinergi dengan IKM untuk meningkatkan ekonomi.
- c. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga bahan baku, terutama pisang, agar produksi IKM berkelanjutan.
- d. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI meminta untuk dilakukan bantuan dan pembinaan penggunaan teknologi agar efisiensi produksi meningkat.

- e. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI meminta dilakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai Hak Kekayaan Intelektual perlu ditingkatkan.
- f. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI meminta untuk dilakukan sosialisasi untuk mendapatkan sertifikasi HACCP sangat penting untuk akses pasar internasional.

Foto Tim Kunker Spesifik Komisi VII DPR RI di Provinsi Lampung



1.7.9. Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Mondelēz Indonesia di Cikarang, Jawa Barat, pada tanggal 21-23 November 2024. Dipimpin oleh Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A /Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN.

Dari pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI ke PT Mondelēz Indonesia di Cikarang, Jawa Barat, terdapat beberapa catatan dan rekomendasi, sebagai berikut:

- a. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI mengharapkan agar di Indonesia dapat dibangun lebih banyak perusahaan seperti PT Mondelēz Indonesia sehingga dapat menampung potensi tenaga kerja dari bonus demografi Indonesia.

- b. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI menekankan agar industri makanan dan minuman di Indonesia lebih berdaya saing dan harus bisa menjadi pasar di negara lain dan jangan hanya menjadi pasar bagi negara lain.
- c. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI mengapresiasi PT Mondelēz Indonesia yang berhasil mendapatkan *green industry award* pada tahun 2024.
- d. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI meminta PT Mondelēz Indonesia untuk lebih *concern* terkait kandungan gula pada produknya, karena hal ini terkait dengan kesehatan masyarakat Indonesia.
- e. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI mengingatkan agar hak-hak karyawan di PT Mondelēz Indonesia terus dapat diperhatikan dengan baik.
- f. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI mengingatkan agar implementasi *automation* dan *digital & connectivity* tidak berdampak PHK karyawan PT Mondelēz Indonesia.
- g. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI menekankan PT Mondelēz Indonesia dan Kementerian Perindustrian untuk memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) industri, misalnya dengan lebih meningkatkan kolaborasi dengan institusi pendidikan.
- h. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI menekankan agar PT Mondelēz Indonesia dan Kementerian Perindustrian untuk dapat lebih meningkatkan proporsi bahan baku lokal.
- i. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI menekankan bahwa jika terdapat kualitas bahan baku yang masih kurang, peran Kementerian Perindustrian serta dari CSR perusahaan termasuk PT Mondelēz Indonesia penting untuk dapat membantu dan meningkatkan kualitas bahan baku lokal. Hal tersebut juga untuk menunjukkan kehadiran pemerintah dan perusahaan dalam

meningkatkan ketersediaan bahan baku lokal yang berkualitas di Indonesia.

Foto Tim Kunker Spesifik Komisi VII DPR RI di Provinsi Jawa Barat



1.8. Kunjungan Kerja Reses

Komisi VII DPR RI pada Masa Sidang I Tahun 2024–2025 mengagendakan Jadwal Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, sebagai berikut:

No.	Kunjungan Kerja	Daerah Kunjungan	Tanggal	Keterangan
1.	Kunker Reses	Provinsi Sumatera Barat	6-10 Desember 2024	Dipimpin oleh: Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A/Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PAN.

2.	Kunker Reses	Provinsi Sumatera Selatan	6-10 Desember 2024	Dipimpin oleh: Hj. Chusnunia Chalim., Ph.D./Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PKB.
3.	Kunker Reses	Provinsi Bali	6-10 Desember 2024	Dipimpin oleh: Dr. Evita Nursanty, M.Sc./Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan.

1.8.1. Kunjungan Kerja pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 ke Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Padang dan peninjauan ke Kawasan Batik Minang (Batik Tanah Liek Hj Wirda Hanim), Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 6-10 Desember 2024. **Dipimpin oleh Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A/Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional.**

Dari pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Padang dan peninjauan ke Kawasan Batik Minang (Batik Tanah Liek Hj Wirda Hanim), terdapat beberapa catatan dan rekomendasi, sebagai berikut:

- a. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan juga

lintas satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan evaluasi pasar untuk menjaga kualitas dan standar produk yang beredar di masyarakat, karena hal tersebut juga berkorelasi dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat.

- b. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI meminta BSKJI Kementerian Perindustrian dan BSPJI Padang untuk lebih meningkatkan sosialisasi terkait berbagai layanan yang dilakukan seperti standardisasi, sertifikasi halal, sertifikasi industri hijau dan layanan lainnya. Sehingga pelaku usaha/UMKM dapat lebih mendapatkan informasi untuk dapat meningkatkan kualitas dan standar produknya.
- c. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian UMKM untuk meningkatkan program pemberdayaan bagi UMKM, terutama terkait permasalahan akses permodalan/pembiayaan. Selain itu, diperlukan peningkatan fasilitasi program bantuan untuk UMKM dalam mendapatkan SNI, sertifikat halal dan lainnya.
- d. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif untuk dapat lebih meningkatkan dan menciptakan ekonomi kreatif di Sumatera Barat karena persaingan dengan global semakin ketat. Untuk itu, juga diperlukan pengoptimalan potensi ekonomi kreatif di Sumatera Barat melalui program pelatihan baik melalui Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian UMKM, dan juga Kementerian Perindustrian.

Foto Tim Kunker Reses Komisi VII DPR RI di Provinsi Sumatera Barat



1.8.2. Kunjungan Kerja pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 ke Desa Wisata Kampung Pangan Inovatif, Kampung Songket dan Politeknik Pariwisata Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 6-10 Desember 2024. **Dipimpin oleh Hj. Chusnunia Chalim., Ph.D./Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.**

Dari pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, terdapat beberapa catatan dan rekomendasi, sebagai berikut:

1. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI meminta Kolaborasi *pentahelix* antara Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta, Akademisi dan Masyarakat di sebuah kawasan desa wisata (termasuk desa wisata Kampung Pangan Inovatif) perlu diperkuat dan dioptimalkan, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menjadi salah satu solusi mengatasi kendala dan hambatan pengembangan desa wisata, yang antara lain terkait:
 - a. permodalan, pengemasan, pemasaran, teknologi produksi, bahan baku dan inovasi, serta standarisasi produk yang menjadi hambatan masyarakat sebagai pelaku usaha (produksi) yang berada di kawasan desa wisata,
 - b. pengelolaan dan pengembangan desa wisata sehingga mampu menciptakan pengalaman dan ketertarikan wisatawan untuk kembali berkunjung ke kawasan desa wisata, dan

- c. pembangunan sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung desa wisata, dan infrastruktur pendukung desa wisata.
2. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Pariwisata melakukan perbaikan metode dan implementasi kurasi penetapan desa wisata agar desa yang ditetapkan sebagai desa wisata benar-benar menggambarkan kondisi dan pengembangan desa wisata serta tidak ada kesalahan penetapan desa wisata di masa mendatang. Hal ini berkaca pada kesalahan kurasi Desa Wisata Kampung Pangan Inovatif yang sebenarnya dibentuk sebagai desa ekonomi kreatif, bukan desa wisata.
3. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Pariwisata melakukan perbaikan pedoman desa wisata yang berfokus pada adanya aturan dan parameter standarisasi penetapan desa wisata.
4. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI meminta Kolaborasi *pentahelix* antara Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta, Akademisi dan Masyarakat perlu diperkuat dan dioptimalkan guna mengakselerasi industri ekonomi kreatif di Sumatera Selatan, yang sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menjadi salah satu solusi mengatasi kendala dan hambatan ekonomi kreatif, yang antara lain terkait keterbatasan infrastruktur kreatif, keterbatasan promosi global, kurangnya kolaborasi

antar pelaku industri, serta masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi produk.

5. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI meminta terkait dengan pembangunan SDM di Politeknik Pariwisata Palembang yang dikaitkan dengan pembangunan pariwisata, Kementerian Pariwisata perlu:

a. Mengoptimalkan komunikasi Politeknik Pariwisata Palembang dengan Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata agar pengembangan SDM Pariwisata lebih linear dan optimal.

b. Mendorong Politeknik Pariwisata Palembang untuk mengoptimalkan peran pendampingan terhadap desa wisata dan ekonomi kreatif di wilayah kerjanya.

c. Menyelesaikan permasalahan terkait belum beroperasinya hotel Politeknik Pariwisata Palembang yang telah selesai dibangun sejak tahun 2023.

d. Melakukan evaluasi terhadap Program studi Politeknik Pariwisata Palembang agar lebih sesuai dengan kebutuhan daerah, kebutuhan industri pariwisata secara nasional, kebutuhan layanan *hospitality* yang diharapkan wisatawan mancanegara dan nusantara serta tidak hanya fokus pada *hospitality* namun juga pada atraksi dan destinasi wisata.

e. Mendorong Politeknik Pariwisata Palembang untuk lebih fokus dan meningkatkan kemampuan berbahasa asing bagi mahasiswa agar nantinya

mudah menempatkan lulusan di hotel dan/atau *MICE Industries* yang berada di luar negeri.

- f. Mendorong Politeknik Pariwisata Palembang agar mampu menghasilkan lulusan yang memiliki *hardskill* dan *softskill* yang unik, unggul dan berbeda dengan lulusan instansi lain, sehingga keberadaan Politeknik Pariwisata Palembang mampu memberikan hasil yang optimal dalam membangun bangsa di bidang pariwisata.
- g. Memastikan program studi dan lulusan Politeknik Pariwisata Palembang *link and match* dengan kebutuhan pasar atau kebutuhan industri pariwisata.
- h. Memastikan Politeknik Pariwisata Palembang memiliki strategi komunikasi pemasaran yang lebih baik guna menjaring calon mahasiswa untuk menempuh pendidikan di Politeknik Pariwisata Palembang. Namun komunikasi pemasaran yang dilakukan harus sejalan dengan upaya Politeknik Pariwisata Palembang memberikan probabilitas lulusan untuk dapat bekerja atau berwirausaha di bidang pariwisata, baik melalui program studi dan kurikulum pendidikan, jejaring kemitraan dan kerja sama dengan lembaga lain.

i.

Foto Tim Kunker Reses Komisi VII DPR RI di Provinsi Sumatera Selatan



DOKUMENTASI



1.8.3. Kunjungan Kerja pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 ke Politeknik Pariwisata Bali, PT. Arpan Bali Utama (*Hatten Wines*), Krisna Oleh-Oleh, Provinsi Bali, pada tanggal 6-10 Desember 2024. Dipimpin oleh Dr. Evita Nursanty, M.Sc /Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan.

Pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke Politeknik Pariwisata Bali, PT. Arpan Bali Utama (*Hatten Wines*), Krisna Oleh-Oleh, Provinsi Bali menghasilkan beberapa catatan dan rekomendasi antara lain:

1. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI mendesak Poltekpar Bali untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan pariwisata yang berfokus pada penyelenggaraan acara-acara besar (MICE);
 - b. Melakukan kajian mendalam terkait dugaan *overtourism* di Bali;
 - c. Menghasilkan SDM pariwisata yang berkompeten serta mampu bersaing secara global;
 - d. Meningkatkan digitalisasi dalam penyelenggaraan konferensi yang saat ini banyak berbasis online;
 - e. Mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai media promosi pariwisata;
 - f. Melakukan kajian tren dan kebutuhan pariwisata saat ini dan yang akan datang agar SDM yang dihasilkan linear dengan kebutuhan industri.
2. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI menyampaikan beberapa catatan pada PT. Arpan Bali Utama (*Hatten Wines*) dan Direktorat Jenderal Agro Kementerian Perindustrian antara lain:
 - a. Menekankan pentingnya regulasi yang mendukung penggunaan produk lokal di sektor *hospitality*;

- b. Mendesak pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan kebijakan dimana hotel, restoran, dan tempat wisata setidaknya memiliki kuota penggunaan produk lokal, termasuk wine;
 - c. Meminta pemerintah menggenjot riset pengembangan industri minuman beralkohol jenis anggur (*wine*) untuk mendukung 100 persen komponen berbahan lokal yang sesuai dengan permintaan pasar.
 - d. Mendorong *Hatten Education Center* sebagai pusat riset wine perusahaan dapat menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan seperti politeknik pariwisata di Bali. Kolaborasi ini diharapkan dapat mencetak ahli-ahli wine dari kalangan lokal yang memiliki keahlian setara dengan tenaga kerja internasional.
 - e. Edukasi dan pelatihan formal sangat penting untuk membangun SDM lokal yang kompeten dan siap bersaing. Komisi VII berharap penguatan industri wine di Bali tidak hanya membawa manfaat ekonomi tetapi juga membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang pendidikan bagi masyarakat lokal.
 - f. Dukungan pemerintah, baik dalam bentuk regulasi maupun fasilitasi pendidikan, menjadi kunci untuk memastikan pertumbuhan sektor ini berkelanjutan dan inklusif.
3. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI mendorong Krisna Oleh-Oleh dan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Memperluas pasar konsumen mancanegara serta ekosistem kewirausahaan;
 - b. Memberikan bantuan pendampingan bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan;

- c. Memanfaatkan penggunaan *platform* digital guna memudahkan konsumen berbelanja sekaligus meningkatkan omset penjualan UMKM yang bermitra dengan Krisna Oleh-Oleh.
- d. Menekankan pentingnya program pemberdayaan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi UMKM, serta mempermudah akses pasar bagi para pelaku usaha kecil dan menengah.

Foto Tim Kunker Reses Komisi VII DPR RI di Provinsi Bali

